

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM
TENTANG TENAGA KERJA ASING
SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



**Oleh :
SAID AHMAD DZAKY ASSEGAF
NPM. 19.81.0689**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2023**

ABSTRAK

Said Ahmad Dzaky Assegaf. NPM. 19810689. 2023. “*Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Tentang Tenaga Kerja Asing Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Ibu Dr. Yati Nurhayati S.H., M.H Pembimbing II Bapak Dr. Akhmad Munawar S.H., M.H

Kata kunci : *Perbandingan, Undang-undang cipta kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing*

Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dengan versi terbaru Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 menuai banyak polemik dikalangan masyarakat khususnya Tenaga Kerja. Permasalahan yang terjadi dikarenakan masyarakat meanggap bahwa peraturan tersebut memberikan kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Penelitian ini difokuskan kepada : bagaimana perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan apakah sudah tepat perubahan daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dengan menganalisis dan mengkaji menitikberatkan pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Perbandingan diantara Undang-Undang ketenagakerjaan terletak kepada kemudahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam melaksanakan proses perizinan Tenaga Kerja Asing dengan hanya membuat RPTKA sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang harus dibuat seperti RPTKA dan Izin tertulis yang disahkan dari Pemerintah Pusat. Lalu, didalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembatasan-pembatasan TKA untuk jabatan-jabatan yang ada di Indonesia sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan merinci hal tersebut dengan merujuk kepada Keputusan Kementerian. Lalu, mengenai pengaturan hukum Undang-Undang Cipta Kerja masih belum tepat untuk dilaksanakan dikarenakan banyak subtansi dari isi peraturan yang ada membuat kesejahteraan masyarakat kian memprihatinkan dikarenakan kesulitan mencari lowongan pekerjaan.

Saran dari penelitian ini pemerintah perlu mengkaji kembali isi dari peraturan Undang-Undang Cipta Kerja agar dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dan pembangunan nasional berjalan dengan baik. Serta, Pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk menghadirkan perizinan tertulis kembali agar permasalahan baru lainnya tidak terjadi, seperti masalah keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azhar, M. (2015). *Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Rajagrafindo Persada.
- Budiono & Rachmat, A. (1995). *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta : PT:Grafindo Persada
- Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dedi Ismatullah. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Faisal, Moch. (2009). *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hakim, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Manululang, S.H. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta:PT Rineka Citera.
- Noegroho, A. (2010). *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. & Mamuji, S. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- RI, Kemanker. (2004). *Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Data dan Informasi*, Jakarta : Direktorat Binapenta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja

Jurnal

- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenagakerja Asing (Tka) Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 25-28.

- Adella, V. (2019). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Jurnal Jurist Diction*, 2 (2).
- Aprianti, N. Safaa, M.A dan Qurbani, I.D. (2021). “Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2): 472–85.
- Abubakar, A.K.S. dan Sulistyowati, T. (2020). “Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Penggunaan Tka Dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Ditinjau Dari Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Dan Undang–Undang 12 Tahun 2011.” *Reformasi Hukum Trisakti* 2(1).
- Azhari, A. Margaretha, H. dan Supriyadi, I. (2022). “Analisis Intelijen Peran Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polresta Tangerang Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Pt Cgc.”
- Djunaidi, D, dan Alfitri, A. (2022). “Dilema Industri Padat Modal Dan Tuntutan Tenaga Kerja Lokal.” *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8(1): 29
- Fajar, K. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5 (1).
- Hanifah, I. 2021. “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6(1): 73-168.
- Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (1).
- Juaningsih, dkk. (2020). “Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(3): 326–37.
- Julianto, J. 2019. “Analisis Yuridis Kontradiksi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Journal Of Law And Policy Transformation* 3(2): 91–101.
- Kurniawan, F. dan Dewanto, W.A. (2020). “Problematika Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk.” *Jurnal Panorama Hukum* 5(1): 63–76.

- Nurhidayati. (2019). Perizinan Tenaga Kerja Asing Kebijakan dan Implementasinya. *Widya Cipta: Jurnal Sekretaris dan Manajemen*, 3 (2).
- Rahmat, Ramadhani dan Ramlan. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer(Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2).
- Ridho, M. (2020). “Urgensi Pelonggaran Ketentuan Masuknya Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Gema Keadilan* 7(2): 221–28.
- Setyawan, Y. (2020). “Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7(1): 150–64.
- Shalihah, F. (2021). Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*. 417-425
- Syaffirah, N. 2020. “Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Tadulako Master Law Journal* 4(2): 252–64.
- Taufik, H., Lubis, & Ismail, K. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2).
- Widodo, Joko. (2014–2019). “Terhadap Tenaga Kerja Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Polgov* 4(1): 67–123.
- Wowiling, dkk. (2023). “Pengaruh Industri Pengolahan Perikanan Terhadap Kesempatan Kerja Di Kota Bitung.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23(2): 73–84.

Website

- Primadhyta, S. “Jejak Startup di Indonesia : Dari Booming Sampai Mulai “Gugur””, CNN Indonesia. Retrived From: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220530150050-92-802731/jejak-startup-di-indonesia-dari-booming-sampai-mulai-gugur> diakses pada 10 Juli 2023
- Kemenkumham, “Tenaga Kerja Asing di Indonesia : Kebijakan dan Implementasi”,<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com>

[_content&view=article&id=1427:tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi](#) diakses pada 10 Juli 2023

Kemen PUPR RI. “Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sektor Konstruksi Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur.”
<https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-sektor-konstruksi-untuk-mendukung-pembangunan-infrastruktur/> pada tanggal akses 10 Juli 2023